# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Hubungan Internasional

Dalam rangka menumbuhkan rasa saling pengertian antar bangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa dengan bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, membina dan menegakkan perdamaian atau ketertiban dunia tentunya hubungan internasional sangatlah penting. Suatu negara yang menolak melakukan hubungan internasional dengan negara lain, maka negara tersebut akan terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian ini kemudian menunjukkan bahwa hubungan internasional sekarang ini tidak hanya sebatas isu-isu tradisional seperti pertahanan dan keamanan saja, namun juga kepada isu-isu lainnya seperti dampak perubahan iklim yang masuk ke dalam isu non-tradisional dalam lingkup global. Lingkup hubungan internasional disini diutamakan terhadap aktor-aktor yang berperan di dalamnya, dimana para aktor tersebut melakukan interaksi yang dapat berpengaruh secara fundamental terhadap pola interaksi dan arah aktivitasnya.

Dalam suatu hubungan internasional, negara-negara melakukan interaksi yang kuat satu dengan yang lainnya dengan melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut didasari oleh keinginan negara dalam mencapai agenda politik dan kebutuhan khususnya. Pola-pola interaksi di dalam hubungan internasional tidak

lagi dapat terelakkan. Interaksi yang tejadi di dalam sistem internasional sesuai dengan jumlah masyarakat yang terus bertambah dan kebutuhan mereka yang bertambah pula, yang kemudian mendorong negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, negara-negara kemudian melakukan apa yang disebut dengan kerjasama internasional.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda - beda dalam segala aspek. Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, karena terdapat faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa tentunya berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, dengan adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka suatu hubungan internasional dianggap sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Menurut Perwita dan Mochammad Yani bahwa:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005: 4)"

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya.

Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat. Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing- masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani bahwa:

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik (Jackson dan Sorensen, 2013:373).
2. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005: 29-34).

### 2.1.2 Peranan Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara memmpunyai 2 tugas :

1. Mengendalikan, mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat seluruhnya.

Miriam Budiardjo mendefinisikan Negara adalah merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Bagi Budiardjo negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. (Darmayadi, 2004:1)

Salah satu bentuk kerangka kerja JICA dalam implementasi ODA adalah modalitas bantuan utama, bantuan teknis, termasuk hibah dan pinjaman. Beberapa bentuk yang termasuk di dalamnya, yaitu kapasitas dan pengembangan

kelembagaan, serta studi kelayakan dan rencana induk. Kasus ini secara implisit menunjukkan bahwa JICA posisi begitu mendominasi dalam implementasi ODA. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bagaimana bantuan itu terealisasi, maka JICA lah yang memiliki peranan yang dominan.

Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaiankan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 2001:221).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur social. Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan.

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil

pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini bergantung pada posisi dan kedudukan struktur tersebut dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta kemampuan dari si pemegang peran (Soekanto, 2001:221).

Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Dengan kata lain posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat dengan begitu seseorang akan menjalankan suatu peranannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. peranan mencakup tiga hal, yaitu

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2001:221).

Peranan nasional akan berkaitan dengan kebutuhan domestik, sikap masyarakat, serta kondisi eksternal. Peranan nasional menggambarkan fungsi dan tugas suatu Negara dalam berbagai konteks Internasional yang berbeda. Dengan demikian peranan Internasional memberikan pedoman untuk bertindak, ketika situasi tertentu muncul pada lingkungan Internasional. Peranan nasional juga merefleksikan tujuan umum dan khusus yang hendak dicapai oleh suatu Negara, baik di daerah kawasan ataupun di dunia secara keseluruhan. Dari ragam definisi, maksud dan peranan kerjasama antar negara, namun secara umum bisa disimpulkan, bahwa Negara secara keseluruhan, pada dasarnya mempunyai peranan_melalui kerjasama_terhadap negara lainnya. Dimana peranan ini bisa terbentuk, oleh karena ada beberapa andil dari negara-negara dalam rangka turut memberikan solusi penyelesaian terkait dengan kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh Negara lainnya. Menyadari bahwa, ini perlu dilakukan, mengingat peranan yang dominan yang dilakukan oleh suatu Negara, akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Negara mitranya.

Menurut Mochtar Mas‟oed dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

> “Peranan (role) adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut” (Perwita dan Yani, 2005:30).

Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat. Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaiankan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 2001: 221).

Menurut Holsti dalam Rudy, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu negara. Tipe-tipe peranan itu, antara lain (Rudy, 2002: 144) :

*1. Bastion of the Revolution, liberator:* Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Salah satu tugas yang diembannya menurut mereka ialah untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagai pelindung gerakan revolusi asing, yaitu dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral oleh para pemimpin revolusi dan juga sebagai pengilham ideologi.

2. *Regional leader*: Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan

negara-negara lain di kawasan yang sama. Tema ini nampak jelas dalam pidato Mesir tentang posisinya di Timur Tengah, juga pada konsep Amerika Serikat akan tugas internasionalnya.

3. *Regional Protector*: Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau *issue area*, peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. Konsep peranan ini rutin dinyatakan dalam pidato politik luar negeri Australia, New Zealand, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

4. *Active Independent*: Kebanyakan pernyataan pemerintah yang mendukung strategi non-blok tidak lebih hanya berupa penegasan peran kemerdekaan‟ dalam politik luar negeri. Beberapa negara mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya mengimplikasikan isolasi ataupun keacuhan. Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatik dengan negara - negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok. Peranan ini sering ditemukan pada pernyataan politik luar negeri Yugoslavia, India, Perancis, Indonesia, Malaysia, Rumania, dan Turki dalam periode tertentu.

5. *Liberation Supporter*: Tidak seperti peran *Bastion of the Revolution*, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri. Kebanyakan negara belum berkembang menempatkan dirinya sebagai pendukung gerakan kemerdekaan atau anti kolonialisme di luar negeri. Mereka adalah simpatisan

gerakan - gerakan ini. Maka dalam pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereka biasanya mengambil sikap anti kolonialisme.

6. *Anti-imperialist Agent*: Dimana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak negara memandang dirinya sebagai agen dalam perjuangan melawan imperialisme. Uni Soviet, Cina, Syria, Vietnam Utara, dan Rumania adalah negara - negara yang bertindak sebagai agen anti imperialism.

7. *Defender of the Faith*: Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.

8. *Mediator - integrator*: Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global. Pernyataan seperti itu biasanya datang dari Kanada, Perancis, Rumania, Amerika dan Yugoslavia.

9. *Regional - subsystem collaboration*: Tema peranan ini berbeda dari peran mediator-integrator karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan berintegrasi dengan unit politik lainnya. Hal-hal seperti ini biasa ditemukan pada negara-negara Eropa.

10. *Developer:* Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu Negara - negara berkembang. Untuk menjalankan

peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. Kebanyakan negara industri, baik di barat maupun di timur, merasa inilah tugas regional atau internasional mereka.

11. *Bridge*: Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu, sebagai penyambung lidah atau jembatan antara negara lain. Peranan ini biasanya tidak berlangsung lama, hanya ad-hoc saja.

12. *Faithful ally*: Yang dimaksud dengan *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu *(fraternal ally)* mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain.

13. *Independent:* Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia. Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional. Kebanyakan negara-negara kecil yang tidak banyak terlibat dalam kancah politik dunia yang mengklaim peran ini.

14. *Example* (keteladanan): Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi negara-negara lain.

15. *Internal development*: Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa

kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.

16. *Other role*: Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan diatas (Rudy, 2002: 144).

Posisi negara dalam lingkungan internasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan Negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. (Triwahyuni, 2008:1)

### 2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional muncul karena berbagai keterbatasan negara seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan teknologi dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, negara pun melakukan upaya-upaya dengan cara berinteraksi dengan negara-negara lain. Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannya pun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000 : 45).

Kerjasama internasional dalam konteks ini tidak melihat bagaimana kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi pola kepentingan, dan juga bagaimana ide-ide serta idealisme tidak serta merta mempengaruhi perilaku negara. Kesamaan kepentingan adalah hal yang sudah ada dari sananya dan ada kondisi yang membuat kesamaan kepentingan menuju kepada kerjasama. Hubungan diantara negara-negara, baik diantara negara- negara maju maupun diantara negara maju dengan negara berkembang memiliki kemungkinan untuk terjadi kerjasama karena memiliki hubungan interdependen satu sama lain, dimana kepentingan dan tujuan mereka dapat terealisasikan melalui kerjasama.

Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2002 : 12).

Hal ini dikarenakan negara dapat membuat seperangkat peraturan dan ketetapan yang dapat mengamankan tujuan yang ini mereka capai. Kerjasama antar pemerintah terjadi ketika kebijakan yang dipatuhi oleh suatu pemerintah diakui oleh negara rekan kerjasamanya dapat merealisasikan tujuan mereka sebagai hasil dari proses koordinasi kebijakan. Kerjasama internasional kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri dapat berupa hibah *(grant),* pinjaman luar negeri *(loan),* atau

juga bantuan teknik yang diberikan oleh negara donor atau badan internasional yang dibentuk untuk memberikan bantuan luar negeri. Pada dasarnya, bantuan luar negeri diperlukan untuk membantu negara-negara miskin dalam memodali mereka untuk memperoleh ketrampilan baru serta teknologi. Dana bantuan sering digunakan untuk membantu membangun sektor unggulan ekonomi yang kemudian, melalui hubungan dengan sektor yang kurang berkembang, dapat meningkatkan proses pembangunan secara bersamaan.

Kerjasama internasional kemudian dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada negara berkembang dalam mendukung pembangunan. Bantuan pembangunan adalah bagian dari kerjasama internasional yang tercipta antara negara yang memiliki kepentingan yang sama. Dana bantuan sering digunakan untuk membantu membangun sektor unggulan ekonomi yang kemudian melalui hubungan dengan sektor yang berkembang, dapat meningkatkan proses pembangunan secara bersamaan. (Griffiths dan Terry, 2002:109)

Seperti misalnya yang dilakukan oleh Jepang dan India dalam mengatasi masalah lingkungan, mereka memiliki persamaan kepentingan yakni menuntaskan permasalahan lingkungan yang ada. Jepang sebagai salah satu negara maju adalah negara yang telah banyak memberikan bantuan pembangunan terhadap upaya proteksi lingkungan di India, yang diketahui sebagai negara berkembang. Bantuan pembangunan tersebut memiliki peran sebagai mekanisme ‘pemompa’, dimana tujuannya adalah untuk memicu pertumbuhan di sektor modern yang kemudian akan ‘menetes ke bawah’ ke sektor-sektor lainnya. Menurut Jack C. Plano dan

Roy Olton, bantuan luar negeri didefinisikan sebagai perpindahan uang, barang maupun bantuan teknis dari negara maju (donor) terhadap negara penerima *(recipients).*(Plano dan Roy, 1999:5)

### 2.1.4 Pinjaman Luar Negeri *(Foreign Loan)*

Ada banyak pengelompokan mengenai jenis-jenis bantuan luar negeri dalam interaksi ekonomi politik internasional. Diantaranya, menurut K. J. Holsti, dalam Rudy ada empat tipe utama bantuan luar negeri , yaitu *technical assistance* atau bantuan teknis, hibah atau *grants* (ada juga program impor komoditi), pinjaman *(loans)* untuk pembangunan, dan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat. Selain itu, ada juga pengelompokan bantuan dari negara-negara kaya kepada negara-negara miskin yang dikenal dengan istilah pemindahan sumber-sumber *(flow of resources).*

Pengelompokannya terdiri dari:

1. Pemindahan sumber-sumber resmi *(flow of official resources),* berupa:
    a. Pemindahan secara bilateral, yaitu *grants* atau hibah, sumbangan yang menyerupai *grants*, dan modal pemerintahan jangka panjang.
    b. Pemindahan secara multilateral, yaitu *grants* dan iuran modal kepada badan-badan pembangunan internasional dan pemberian hutang kepada badan-badan tersebut termasuk pembelian obligasi.
2. Pemindahan sumber-sumber swasta *(flow of private resources),* berupa:

Investasi langsung swasta *(foreign direct investment),* investasi portofolio *(portfolio investment),* pinjaman bank komersial *(commercial bank lending),* dan kredit ekspor *(exports credit).* Hingga kini, pinjaman luar negeri kian meningkat

dengan berbagai alasan ekonomi, antara lain alasan *saving gap* (kesenjangan tabungan) dari suatu negara dengan rencana investasi yang sesuai dengan sasaran pembangunannya. (Rudy, 2009:2-3).

Pinjaman luar negeri, dalam praktiknya memiliki bentuk atau jenis yang beragam sesuai dengan sifatnya. Jika dilihat dari sifat persyaratan pinjaman, maka pinjaman luar negeri dapat diklasifikasikan atas:

1. Pinjaman Lunak *(Concessional Loan)*

Pinjaman ini berasal dari lembaga multilateral maupun lembaga bilateral. Pinjaman ini bercirikan tingkat bunga sekitar 3,5%, jangka waktu pengembalian yang panjang (sekitar lebih dari 20 tahun), dan masa tenggang *(grace period)* cukup panjang, yakni 7-10 tahun. Contohnya dalam hal ini seperti pinjaman yang diberikan JICA ke India yang seringkali memberikan pinjaman untuk jangka waktu 25-40 tahun.

2. Pinjaman Setengah Lunak *(Semi Concessional Loan)*

Pinjaman ini adalah pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman sebagian komersil namun dijamin oleh suatu lembaga pengembangan ekspor. Biasanya bentuknya berupa fasilitas kredit ekspor, misalnya suatu negara yang ingin memajukan ekspor di negaranya akan menyediakan pembiayaan bagi suppliernya untuk menjual barangnya kepada debitor. Dulu dikenal juga dengan istilah *purchase and installment sales agreement*, contohnya dari *Leasing Company di Jepang.*

3. Pinjaman Komersial *(Commercial Loan)*

Pinjaman ini adalah pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya (Ikbar, 2007:188).

Berdasarkan sifatnya lagi, terdapat lagi pembedaan seperti:

a. Pinjaman Bilateral, yaitu pinjaman dengan jumlah kecil yang berasal dari satu bank
b. Pinjaman Multilateral, yaitu pinjaman dalam jumlah besar yang berbentuk sindikasi.

Sedangkan berdasarkan bentuknya, terdapat juga pembedaan seperti:

a. Bentuk surat utang (notes) dengan bunga mengambang, atau obligasi (bonds) dengan bunga yang tetap. Keduanya sama-sama berasal dari pasar modal (capital market)
b. Pinjaman dari perbankan internasional yang berbentuk sindikasi dengan jumlah pinjaman yang besar (Ikbar, 2007:189).

Pada penelitian ini, negara maju seperti Jepang berkontribusi dalam pemberian pinjaman terhadap pembangunan negara berkembang yaitu India dalam bidang proteksi lingkungan. Pemerintah Jepang memberikan bantuan luar negeri terhadap pembangunan di sektor lingkungan kepada India melalui JICA. Peranan yang dilakukan dapat berupa pemberian dalam bentuk pinjaman uang, serta pelayanan atau ide-ide dalam rangka membuat sesuatu yang bermanfaat. Kontribusi dan bantuan yang dilakukan oleh JICA ini bersifat *government to government* karena disini JICA merupakan perpanjangan tangan dan bagian dari

pemerintah Jepang untuk menjalankan ODA Jepang, yang kemudian berhubungan dengan pemerintah India.

### 2.1.5 Keamanan Lingkungan *(Environmental security)*

Pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), telah menggagas Konferensi Stockholm dengan tema *Conference on the Human Environment* dengan salah satu isi deklarasinya. "Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta lingkungannya, yang memberinya kelebihan fisik dan kemampuan-kemampuan dalam hal kecerdasan berpikir, moral, sosial dan pertumbuhan rohani".

Sekuritisasi lingkungan merupakan upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang ada di Bumi. Isu lingkungan ini memunculkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yakni kelompok epistemik, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi-organisasi internasional. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam sekuritisasi lingkungan mengagendakan kegiatan mereka ke dalam agenda ilmiah dan politik. Agenda ilmiah ini lebih menekankan pada kegiatan ilmu pengetahuan dan bersifat non-pemerintah. Agenda ini dibentuk di luar arena politik oleh ilmuwan dan institusi penelitian dengan menunjukkan permasalahanpermasalahan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup peradaban saat ini. Di sisi lain, agenda politik berada di lingkungan pemerintahan. Agenda ini berisikan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur cara mengatasi masalah-masalah lingkungan. Kebijakankebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk mengurangi aktifitas manusia yang menimbulkan efek samping berupa degradasi lingkungan serta

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim (Detraz dan Betsill, 2009: 308).

Meskipun demikian, sepertinya masyarakat internasional belum mengalihkan perhatianya pada isu lingkungan hidup. Perang, konflik perbatasan, dan isu seputar ideologi masih mendominasi isu dan percaturan global. Istilah ES kemudian mulai dipakai oleh para scholars semenjak pertama kali dipidatokan oleh Svensson, baru setelah enam belas tahun kemudian di kota yang sama tepatnya dalam presentasinya yang bertajuk "*Environmental Security: A Concept International Conference on Environmental Stress and Security"*, istilah ES semakin ramai digunakan.

Namun cara pandang seperti ini seolah mempersempit alternatif strategi untuk menghadapi degradasi lingkungan. Tanggung jawab negara-negara industri untuk mengontrol emisi gas rumah kaca tersebut menunjukkan bahwa keamanan lingkungan seakan hanya menekankan pada hubungan antara konsumsi energi dan perubahan iklim. Implikasi dari adanya relasi ini adalah potensi ketegangan yang menyertainya mengingat keamanan energi biasanya diasosiasikan dengan negara yang cenderung lekat dengan logika realisme dan prinsip menang-kalahnya. Di sisi lain, keamanan iklim pada umumnya dikaitkan dengan pendekatan kooperatif. Oleh sebab itu, jika keamanan lingkungan hanya ditekankan pada sektor energi, maka penyelesaian terhadap permasalahanpermasalahan terkait perubahan iklim cenderung lebih bersifat antagonis daripada kooperatif (Trombetta, 2008: 596-597).

Dari sudut pandang ini, tampak terlihat bahwasanya kajian keamanan lingkungan lebih condong pada aspek - aspek kemanusiaan. Berbagai elemen dasar terpenuhinya kebutuhan manusia secara layak akan terus mengalami perkembangan menjadi suatu kepentingan tercapainya keamanan nasional. Karena dengan kelayakan pola hidup manusia, maka dapat mengeliminir kemunculan konflik yang rentan terhadap perusakan kestabilan lingkungan.

Dalam situs *Institute for Environmental Security* menyebutkan setidaknya ada empat cakupan kajian dasar yang disoroti, yakni sebagai berikut;

1. Pertama, lingkungan adalah isu transnasional yang paling transnasional, dan keamanannya adalah dimensi penting dari perdamaian, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang sekarang sedang dipahami
2. Kedua, selama 100 tahun ke depan, sepertiga tutupan lahan global saat ini akan diubah, dengan dunia menghadapi pilihan yang semakin sulit di antara konsumsi, jasa ekosistem, pemulihan, dan konservasi dan pengelolaan
3. Ketiga, keamanan lingkungan adalah pusat keamanan nasional, yang terdiri dari dinamika dan interkoneksi antara basis sumber daya alam, struktur sosial negara, dan mesin ekonomi untuk stabilitas lokal dan regional
4. Keempat, sementara peran yang tepat dari lingkungan dalam damai, konflik, destabilisasi dan ketidakamanan manusia dapat berbeda dari satu situasi ke situasi lainnya dan karena itu masih diperdebatkan dalam kaitannya dengan variabel keamanan dan konflik lainnya, ada indikasi

yang berkembang bahwa itu semakin menjadi penyebab ketidakstabilan, konflik, dan kerusuhan (http://www.envirosecurity.org/, diakses pada 11 Juli 2018)

Keempat poin di atas, menunjukkan sedemikian pentingnya keberadaan lingkungan dalam kehidupan manusia, isu - isu lingkungan terus berkembang menjadi kajian yang krusial bagi keberlangsungan masa depan peradaban di bumi. Oleh karenanya, menjaga aspek keamanan lingkungan, akan selalu terkorelasi dengan hak dasar manusia. Isu keamanan lingkungan menjadi sangat sensitif karena rentan terhadap konflik.

Senada dengan yang dipandang oleh M. Shamsul Haque, terkait definisi ES, kajian ini mencakup isu perubahan iklim, ancaman sistem biologi, kelangkaan energi, ketidakamanan pangan, dst. Dalam menghadapi problematika lingkungungan, ES memandang perlunya membangun sebuah institusi inovatif global yang mampu mengatur mekanisme tatanan lingkungan. Berangkat dari asumsi dasar, bahwa lingkungan akan selalu menjadi urusan bersama, maka dibutuhkan *guideline* dan program yang komprehensif serta menyentuh akar permasalahan secara global (Haque, 2013:381).

Berbagai misi dan program penyelematan, pelestarian, dan penyelesain masalah lingkungan akan melibatkan banyak elemen masyarakat. Oleh karenanya ES pada tatanan domestik diperlukan, untuk dapat menjadi komposisi terciptanya keamanan internasional. Maka penulis menawarkan pemikiran tentang hubungan kolaboratif ini, yang diharapkan mampu menghasilkan aksi kolektif yang

berorientasi kepada *problem solving* dan *preventive actions* dalam kemasan perdamaian.

ES semakin penting ketika dunia telah tiba pada fase kelangkaan sumber daya alam. Karena secara karakteristik, sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan (dapat habis) diperankan menjadi objek yang diperebutkan berbagai negara. Minyak bumi, gas alam, batu bara atau hasil tambang lainnya diburu terus menerus. Konflik yang muncul kemudian, karena tidak semua negara memiliki kandungan sumber daya alam yang sama.

Pada tahap inilah pertarungan dimulai, di mana negara-negara kuat berekspansi ke berbagai negara lemah yang memiliki sumber daya alam lebih banyak. Agen-agen kapitalisme menyebar merajalela ke setiap penjuru dunia bahwa faktor-faktor lingkungan memainkan peranan penting dalam menghidupkan dan memperbesar konflik, sehingga terbentuk kelangkangan sumber daya alam (Haque, 2013: 396).

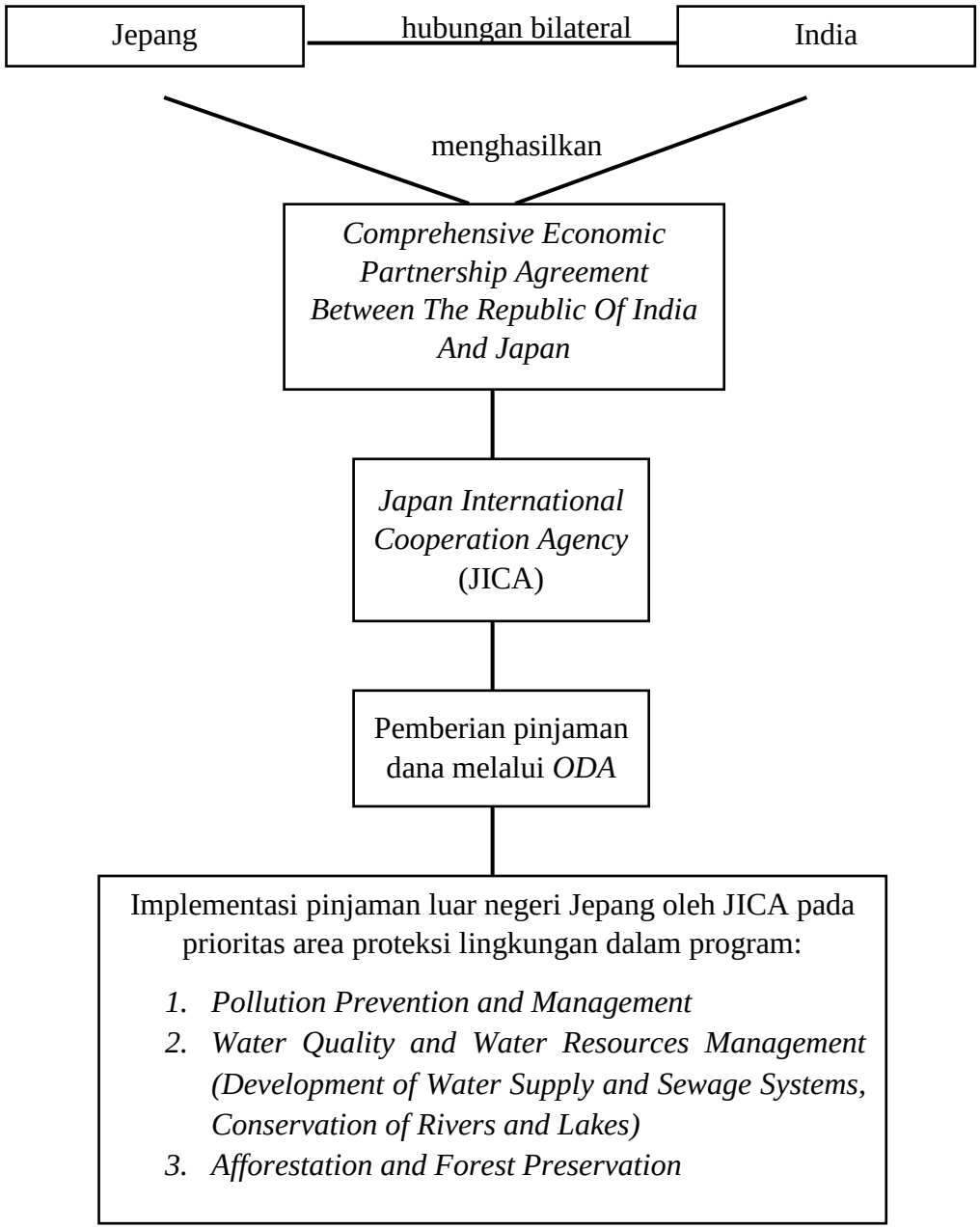
## 2.2 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, tujuan utama hubungan bilateral yang terjalin antara negara Jepang dan India adalah guna membangun kemitraan yang kuat dan menciptakan hubungan persahabatan. Kemudian berlanjut pada fungsi dari Peranan yang dilakukan negara dalam hal ini Jepang apabila dilihat dari tipe peranan apabila merujuk dari teori menurut Holsti ialah pada peranan sebagai *Developer,* dimana peranan Jepang mengindikasikan pada tugas sebagai negara maju yang dibutuhkan kemampuannya untuk membantu negara berkembang

dalam hal ini India berupa pinjaman luar negeri untuk pembangunan yang berfokus pada lingkungan.

Kemudian kerjasama internasional yang terjalin di atas berlanjut pada pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik keamanan serta lingkungan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral antara Jepang dan India ini sangat dibutuhkan yang selanjutnya berfokus pada tujuan keamanan lingkungan bersama, dalam kerangka pemikiran ini akan menggambarkan bentuk interaksi yang dilakukan Jepang dan India yang meghasilkan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of India And Japan* yang kemudian berlanjut pada pola hubungan yang terjadi antara Jepang melalui JICA dengan memberikan pinjaman dana melalui ODA  yang di berikan kepada India dalam program proteksi lingkungan.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:




**Gambar 2.1**

Bagan Kerangka Pemikiran